



Faktor Penentu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Kudus

Dennyca Hendriyanto Nugroho ^{1*}, Febra Robiyanto ², dan Ratna Faridotun Naim Pratama ³

¹ Universitas Muria Kudus, Kudus, Central Java, Indonesia; e-mail : dennyca.hendriyanto@umk.ac.id

² Universitas Muria Kudus, Kudus, Central Java, Indonesia; e-mail : febra.robiyanto@umk.ac.id

³ Universitas Muria Kudus, Kudus, Central Java, Indonesia; e-mail : 20191209@std.umk.ac.id

* Corresponding Author : Dennyca Hendriyanto Nugroho

Abstract: The accountability of village fund management is a crucial obligation for village governments as a form of responsibility for the use of public funds, in accordance with the mandate of Law Number 6 of 2014. This study aims to examine the influence of leadership, clarity of budget objectives, supervision, utilization of information technology, and the village financial system on the accountability of village fund management. The research employed a quantitative method with a survey approach using questionnaires. The sample consisted of 345 respondents who were village officials from 123 villages in Kudus Regency. Data analysis was carried out using multiple linear regression with SPSS version 25. The results show that leadership, clarity of budget objectives, and the use of information technology have a significant positive effect on the accountability of village fund management. In contrast, supervision and the village financial system were found to have no significant impact. These findings highlight the importance of effective leadership, clear budget targets, and the optimization of information technology in achieving accountable village fund management.

Keywords: accountability; village funds; leadership; information technology; village financial system.

Abstrak: Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban penting bagi pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 345 responden yang merupakan aparatur desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, pengawasan dan sistem keuangan desa tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang efektif, sasaran anggaran yang jelas, dan optimalisasi teknologi informasi dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Kata kunci: akuntabilitas; dana desa; kepemimpinan; teknologi informasi; sistem keuangan desa.

Received: 2 Juli 2025

Revised: 6 Juli 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 1 November 2025

Curr. Ver.: 1 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan publik yang akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejak diberlakukannya UU Nomor 06 Tahun 2014 pemerintah pusat mendorong pembangunan berbasis desa melalui alokasi dana desa (DD) yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, dana desa bertujuan mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Namun demikian, peningkatan jumlah dana tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan yang akuntabel.

Studi oleh [17] dan [22] menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut juga tercermin di Kabupaten Kudus, objek dalam penelitian ini, di mana pada tahun 2023 masih terdapat 18 desa yang belum mencairkan dana desa tahap pertama akibat kendala administratif. Padahal 123 desa di wilayah ini telah membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang seharusnya menjadi prasyarat utama dalam proses pencairan. Kasus ini mencerminkan belum optimalnya praktik akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal desa, khususnya pada aspek perencanaan, pelaporan, dan penatausahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, di antaranya kepemimpinan [12], kejelasan sasaran anggaran [1], pengawasan [20], pemanfaatan teknologi informasi [4], dan sistem keuangan desa [3]; [5]. Meskipun demikian, hasil-hasil penelitian tersebut belum menunjukkan konsistensi temuan. Misalnya, penelitian oleh [13] menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, sementara [8] bahkan menemukan bahwa sistem keuangan desa dapat berdampak negatif bila tidak didukung pemahaman SDM yang memadai. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk ditelusuri lebih dalam, khususnya dalam konteks yang lebih luas dan kompleks seperti Kabupaten Kudus yang memiliki keragaman kondisi administratif dan geografis desa. Selain itu, variabel sistem keuangan desa, yang mencakup penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu pelaporan keuangan berbasis elektronik, masih jarang dikaji sebagai variabel independen secara eksplisit dalam literatur terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara lima variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal secara objektif serta dapat menjangkau populasi besar secara efisien [6]; [9]. Dalam konteks penelitian ini, analisis regresi membantu mengidentifikasi kontribusi relatif masing-masing faktor seperti kepemimpinan, anggaran, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas desa. Namun, pendekatan kuantitatif memiliki keterbatasan dalam menggali konteks sosial dan motivasi individu secara mendalam, sehingga interpretasi hasil tetap perlu mempertimbangkan dinamika lokal yang tidak tercakup dalam data numerik [14].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara simultan dan parsial pengaruh kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: sejauh mana kelima faktor tersebut memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Kepemimpinan (H_1) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran (H_2) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan (H_3) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi (H_4) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, sistem keuangan desa (H_5) juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh lima variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah desa di Kabupaten Kudus, yang pada tahap awal terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan. Namun, dalam proses seleksi dan validasi

data, satu desa dan seluruh kelurahan dikeluarkan dari unit analisis karena tidak sesuai dengan kriteria penelitian. Dengan demikian, unit analisis akhir mencakup 122 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proporsional random sampling*, dengan target tiga responden dari setiap desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan aparat pengelola keuangan desa. Dari 396 kuesioner yang disebar, 366 kembali dan setelah proses penyaringan, sebanyak 345 kuesioner dinyatakan layak dan digunakan dalam analisis. Rincian proses ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel. 1 Distribusi Responden Penelitian dan Proses Seleksi Data.

Tahapan Seleksi & Pengumpulan Data	Jumlah Unit/Responden
Total desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus	123 desa + 9 kelurahan = 132
Unit tidak sesuai kriteria (1 desa + 9 kelurahan)	10
Jumlah desa dalam unit analisis	122 desa
Target responden per desa	3 (Kepala desa, Sekdes, Bendahara)
Total kuesioner yang disebar	396 kuesioner
Kuesioner kembali	366
Kuesioner layak setelah validasi	345 kuesioner

2.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator-indikator teoritis dari masing-masing variable. Instrumen dideskripsikan pada table dibawah ini.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Jenis	Indikator
1	Kepemimpinan	Independen	Kesediaan menerima kritik, pengambilan keputusan dan kerja sama, memotivasi, pengarahan
2	Kejelasan Sasaran Anggaran	Independen	Tujuan, tingkat kesulitan, standar, sasaran prioritas, kinerja
3	Pengawasan	Independen	Akurat, tepat waktu, obyektif, dapat dipahami
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Independen	Software pendukung, ketersediaan jaringan, pemanfaatan sesuai ketentuan, komputerisasi
5	Sistem Keuangan Desa	Independen	Kemudahan penggunaan Risiko Fitur pelayanan Pemanfaatan perangkat lunak
6	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Dependen	Transparansi, pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap aturan

2.2 Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Tahapan analisis dimulai dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen, diikuti oleh uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model regresi. Selanjutnya, digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen dan dependen. Uji F digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh secara simultan, sedangkan uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kepemimpinan (X ₁)	345	16	45	39,94	4,124
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	345	16	30	26,73	2,604
Pengawasan (X ₃)	345	10	35	30,72	3,366
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	345	21	30	27,10	2,500
Sistem Keuangan Desa (X ₅)	345	30	50	44,60	4,633
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	345	21	30	27,32	2,533

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang tinggi dan berada mendekati skor maksimum, yang mengindikasikan penilaian responden cenderung positif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rata-rata tertinggi terdapat pada sistem keuangan desa (mean = 44,60), sedangkan yang terendah adalah kejelasan sasaran anggaran (mean = 26,73). Semua standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang menunjukkan persepsi responden relatif homogen.

3.1.1 Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hubungan antar variabel, digunakan analisis regresi linier berganda. Berikut hasil pengujian regresi parsial (uji t).

Tabel. 4 Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Keterangan
Kepemimpinan (X ₁)	0,131	3,856	0,000	Signifikan (+)
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	0,281	5,209	0,000	Signifikan (+)
Pengawasan (X ₃)	-0,063	-1,334	0,183	Tidak Signifikan
Teknologi Informasi (X ₄)	0,383	7,265	0,000	Signifikan (+)

Sistem Keuangan Desa (X_5)	0,024	0,716	0,474	Tidak Signifikan
--------------------------------	-------	-------	-------	---------------------

3.1.2 Model Persamaan Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditampilkan pada Tabel 4, diperoleh model persamaan regresi linier berganda yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 5,061 + 0,131X_1 + 0,281X_2 - 0,063X_3 + 0,383X_4 + 0,024X_5 + e$$

Keterangan:

Y	= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
X_1	= Kepemimpinan
X_2	= Kejelasan Sasaran Anggaran
X_3	= Pengawasan
X_4	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
X_5	= Sistem Keuangan Desa
e	= Error (residual)

Hasil regresi menunjukkan bahwa tiga dari lima variabel independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu kepemimpinan ($\beta = 0,131$), kejelasan sasaran anggaran ($\beta = 0,281$), dan pemanfaatan teknologi informasi ($\beta = 0,383$). Sementara itu, variabel pengawasan dan sistem keuangan desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi terbesar terhadap variasi akuntabilitas.

3.1.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi

Table. 5 Uji F dan Koefisien Determinasi

Statistik Uji	Nilai
F (Uji Simultan)	77,348
Sig. F	0,000
R Square	0,533
Adjusted R Square	0,526

Nilai F sebesar 77,348 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan dalam menjelaskan variabel akuntabilitas. Adjusted R^2 sebesar 0,526 menunjukkan bahwa 52,6% variasi dalam akuntabilitas dapat dijelaskan oleh lima variabel independen. Sisanya sebesar 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti integritas individu, partisipasi masyarakat, atau budaya organisasi desa.

3.2 Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kepemimpinan aparatur desa, kejelasan tujuan penggunaan anggaran, serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi faktor utama yang mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Secara teoritis, temuan ini menguatkan pendekatan *stewardship* yang menempatkan kepala desa sebagai pelayan kepentingan masyarakat, di mana kemampuan memimpin secara efektif mencerminkan integritas dan komitmen terhadap transparansi publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti [7], serta [15] yang juga menemukan bahwa kepemimpinan yang kuat berkontribusi terhadap meningkatnya akuntabilitas. Kejelasan sasaran anggaran pun terbukti memudahkan proses perencanaan dan evaluasi, sehingga memperkuat pertanggungjawaban penggunaan dana. Penelitian ini mendukung temuan [10] dan [19] yang menyatakan bahwa anggaran yang disusun dengan sasaran yang jelas akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta memperkuat legitimasi publik terhadap pemerintah desa.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi variabel yang paling dominan dalam mendukung akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian [4] dan [11] yang menegaskan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis digital seperti SISKEUDES memungkinkan pengelolaan dana desa menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi secara sistematis. Akan tetapi, efektivitas pemanfaatan teknologi tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Di sisi lain, hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan dan sistem keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Lemahnya fungsi kontrol internal dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi penyebab ketidakefektifan pengawasan dalam mendorong akuntabilitas. Temuan ini konsisten dengan studi [18] & [2] namun bertentangan dengan [20] yang menyatakan bahwa pengawasan yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan pengelolaan dana. Demikian pula, meskipun sistem keuangan desa secara desain ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, hasilnya tidak signifikan dalam penelitian ini. Keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap sistem, kurangnya pelatihan teknis, serta potensi kesalahan input dapat menjadi faktor penghambat efektivitas sistem tersebut. Temuan ini berbeda dengan hasil studi [5] yang menemukan adanya korelasi positif antara keberadaan sistem keuangan desa dan akuntabilitas keuangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem tidak otomatis meningkatkan kualitas pengelolaan dana jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat desa. Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas dana desa tidak cukup hanya mengandalkan instrumen formal seperti sistem dan prosedur, melainkan juga membutuhkan investasi dalam kualitas manusia dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

4. Kesimpulan dan Impikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus, diperoleh sejumlah temuan penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor yang paling dominan.
- 2) Variabel pengawasan dan sistem keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 3) Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan *stewardship* yang menekankan peran pemimpin sebagai pelayan kepentingan publik serta menggarisbawahi pentingnya unsur manusia dan teknologi dalam membangun akuntabilitas publik di tingkat desa.
- 4) Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi kebijakan berupa: (a) peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur desa melalui pelatihan manajerial dan etika publik, (b) peningkatan kejelasan perencanaan anggaran desa dengan panduan sistematis dan partisipatif, (c) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi seperti SISKEUDES dengan dukungan pelatihan teknis dan pengawasan implementasi, (d) penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan BPD dan masyarakat desa, serta (e) pendampingan teknis, pembaruan sistem, dan audit berkala untuk memastikan sistem keuangan desa berjalan optimal.

Daftar Pustaka

- [1] Agus Suma Arta, I. M., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 709. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p26>
- [2] Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172>
- [3] Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1.
- [4] Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Feb*, 1(1), 1–15.
- [5] Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- [6] Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Sage Publications, Inc.* (2nd ed., Vol. 77, Issue 4). SAGE Publication, Inc. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- [7] Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26.

- [8] Fitriani, Y., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2021). Antecedents of Accountability of Village Fund Management (Empirical Study in Village in Borobudur District, Magelang Regency). In *Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang Ekonomi Dan Bisnis* (pp. 331–346).
- [9] Hair, J. F., Black, C. W., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (Seventh).
- [10] Hidayat, T. (2017). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan. Akuntabilitas*. 8(2), 148–161.
- [11] Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- [12] Julian, D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Bidang Layanan Sipil Di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Media Mahardhika*, 19(3), 489–516.
- [13] Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior and Perception of Accountability of Village Fund Management in Cultural Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- [14] Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social research methods : qualitative and quantitative approaches*. Pearson.
- [15] Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226–237.
- [16] Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.
- [17] Ra'is Yeni, D. U., & Rini, T. (2024). Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration & Development Published by Penerbit Forind*, 1(2), 89–102.
- [18] Rosalinda, V. (2022). Effectiveness of Supervision Function on Village Fund Management. *Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa*, 4(1).
- [19] Suma Arta, A., & Rasmini, I. M. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26.
- [20] Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.
- [21] UU Nomor 06 Tahun 2014, Pub. L. No. 06 (2014).
- [22] Yulindawati. (2024). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa*. 1(2), 107–123. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan> | 107